

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2010, mengenai ketentuan umum, pasal 1 menyampaikan bahwa Pendidikan kedinasan ialah Pendidikan progesi yang di selenggarakan oleh Kementrian, Kementrian lain, atau Lembaga pemerintah nonkementrian yang berfungsi sebagai peningkatan kemampuan serta keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri dan calon pegawai negeri.



Gambar 1. 1 Pemberitaan portal berita BCC menyorot mengenai kekerasan di sekolah kedinasan
(sumber: [Bullying: Taruna STIP tewas dianiaya senior, pimpinan sekolah dinonaktifkan - Mengapa kekerasan berlatar 'arogansi senioritas' sulit diberantas di lingkaran sekolah ikatan dinas? - BBC News Indonesia](#))

Kasus penganiayaan di lingkungan seolah kedinasan khususnya STIP, tercatat sudah terjadi sebanyak empat kali terjadi. Yaitu, tahun 2008, 2014, 2017, 2024, (ADRI, n.d.). hal ini yang menyebabkan publik marah karena kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian taruna, publik mengecam Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian ini.



Gambar 1. 2 Arsip berita Kompas, taruna tewas di tangan senior di STIP tahun 2014
(sumber: <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/09/empat-kasus-kematian-di-stip-jakarta-tidak-ada-penerimaan-siswa-baru>)

Beberapa waktu ini maraknya kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkup sekolah kedinasan menimbulkan reaksi kecewa dari beberapa pihak. seperti kasus penganiayaan taruna STIP di Jakarta pada Jum'at, 5 Mei 2024 yang mengakibatkan satu korban jiwa Putu Satria Ananta Rastika (19) dengan pangkat taruna Tingkat satu. hal ini menimbulkan reaksi dari public kepada Kementerian Perhubungan karena Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta di bawah naungan Kementerian Perhubungan, STIP merupakan perguruan tinggi kedinasan dan ikatan dinas di Indonesia. Adanya kasus seperti ini secara tidak langsung

berdampak pada reputasi Kementerian Perhubungan atau Lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab atas kejadian penganiayaan yang sudah terhitung terjadi empat kali, motif yang di temukan dalam kasus penganiayaan dalam lingkup sekolah kedinasan STIP selalu dikaitkan masalah senioritas.

Kasus ini berdampak sangat buruk kepada citra Kementerian Perhubungan sebagai Lembaga yang bertanggung jawab, karena STIP masih di bawah naungan Kementerian perhubungan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Kepercayaan publik kepada kementerian perhubungan menurun hal ini dapat menyebabkan tertanggunya program-program unggulan dalam Kementerian Perhubungan. Seharusnya masalah ini tidak terlalu mengganggu Kementerian Perhubungan secara langsung jika krisis ini dapat di Kelola dengan baik oleh pihak STIP, Krisis yang tidak dikelola dengan baik oleh STIP membuat nama Kementerian Perhubungan terseret dalam kasus ini, perlunya penerapan manajemen krisis serta kolaborasi dalam menjalankan menejemen komumikasi antara pihak STIP dan humas pusat Kementerian Perhubungan supaya Krisis ini dapat di Kelola dengan baik tanpa menyeret secara langsung Kementerian perhubungan.

Gagalnya pengelolaan krisis yang baik di lingkup STIP menyebabkan krisis ini merambat ke dalam humas pusat Kementerian Perhubungan, hal Ini di buktikan dengan diserangnya akun Instagram Kementerian Perhubungan *@Kemenhub151* di luar postingan yang membahas mengenai kasus ini, hal ini terjadi karena akun Instagram *@stip_jakarta* postingan mengenai kasus ini kemudian menutup kolom komentar postingan itu yang menyebabkan publik

marah lalu melontarkan kekecewaannya di kolom komentar postingan akun @kemenhub151.



Gambar 1.3 Postingan instagram @kemenhub151 kolom komentar dipenuhi kecaman warganet
(sumber: https://www.instagram.com/p/C6iFBTlp04N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFFZA==)

Seperti komentar pada akun @ren_runners, ia menuliskan “ *Adab lebih tinggi dari ilmu, membudayakan kekerasan bukanlah tujuan dari pendidikan mirisnya terjadi di momen hari pendidikan. Tangis air mata dan harapan orang tua pupus di kampus @stip_jakarta, dengan segala hormat pak Menteri pertimbangkanlah untuk menutup kampus ini. Terima kasih*”, sejumlah individu lain juga turut mengekspresikan kemarahannya seperti akun @deni_permana001 “*hallo pak mentri gimana kabar adik saya yng meninggal di STIP itu??, bahkan ada seorang yang turut berkomentar dengan akun Instagram @jos_sip, ia mengatakan ” STIP TOLONG DIKAJI SISTEMNYA KOK SAMPAI MENCABUT NYAWA ORANG? 🤔🤔 KELIHATAN PENABAT HANYA MAU UANGNYA SAJA TPI TIDAK MENGAWAS DAN MEMANTAU SCR DETILL 🤔🤔🤔*”.

Hal ini adalah bentuk protes publik kepada Kementrian Perhubungan atas ketidakpuasan kepada Kementrian perhubungan yang lalai dalam melakukan pengawasan sehingga kejadian seperti ini sering terulang di lingkungan sekolah kedinasan dibawah naungan Kementrian Perhubungan, serta menuntut pihak Kementrian perhubungan untuk mengevaluasi agar krisis serta kekerasan seperti ini tidak terulang Kembali.

Angka kekerasan dalam Pendidikan di Indonesia sangat tinggi, dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) www.kpai.go.id menurut survey International Center For Research On Women (ICRW) tahun 2017, bahwa sebanyak 84% anak yang ada di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, angka ini tinggi dari presentase di negara nepal sebanyak 79%, Vietnam 79% dan Kamboja sebanyak 73 persen. terlebih kepada Pendidikan yang menerapkan sistem semi militer, Sekolah Tinggi Pelayaran (STIP) merupakan salah satu contoh dari banyaknya sistem pendidikan semi militer yang ada di Indonesia, penerepan sistem Pendidikan semi militer pada tarunanya bertujuan untuk membangun sikap disiplin, tangguh di setiap tantangan, jiwa korsa, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada setiap taruna maupun taruninya.

Setiap taruna harus memiliki rasa saling menghormati satu sama lain terlebih terhadap seniornya, taruna yang tingkatnya lebih rendah (junior) harus menaati perintah serta nasehat baik dan benar, yang di berikan oleh taruna yang tingkatannya lebih tinggi (senior) serta menjalankanya dengan rasa penuh hormat, bersungguh-sungguh, keikhlasan dari hari dan rasa tanggung jawab. Namun, ada

oknum-oknum senior yang memanfaatkan kekuasaan ini dengan memberikan hukuman dengan Tindakan kekerasan kepada juniornya (Sarah & Indriana, 2018)

Hal ini menyebabkan individu yang berada di Tingkat junior dapat mengidap masalah-masalah yang menyerang psikologisnya yang sudah disebutkan dalam buku psikologi pendidikan (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) ditemukan bahwa korban tindak kekerasan sering mengalami Tingkat stress yang meningkat, kecemasan, ketidakstabilan emosional, serta berbagai masalah Kesehatan (Reswita & Bernadet Buulolo, 2023) mengatakan bahwa individu yang menyaksikan atau mendengar tentang kekerasan masyarakat dikaitkan dengan hasil kesehatan mental negatif yang serius, sama seperti mengalami langsung kekerasan. Menurut Leo Tolstoy (Sarah & Indriana, 2018) memiliki pendapat bahwasannya kekerasan hanya akan mengundang datangnya dendam dan saling balas dendam menggunakan kekerasan. Hal ini juga di dukung oleh Myers 2012 (al-haq, 2022) di dalam bukunya mengatakan bahwa kelompok Masyarakat yang sudah biasa bahkan akrab dengan perilaku kekerasan akan dijadikan model bagi anggota juniornya untuk melakukan tindakan agresif juga, sehingga akan memungkinkan bagi junior yang pernah mendapatkan kekerasan akan melakukan kekerasan kembali kelak kepada juniornya.

Kekerasan sering terjadi di lingkup perguruan tinggi, tetapi lebih sering terjadi kekerasan dalam lingkungan sekolah kedinasan pola tradisi dan doktrin yang di lakukan oleh senior hal seperti ini sering ada pembiaran yang akhirnya dijadikan tradisi di Sebagian perguruan tertinggi di sekolah kedinasan, pembiaran

tradisi ini adalah yang memicu terjadinya kekerasan fisik yang terjadi di sekolah kedinasan (Lohy & Pribadi, 2021).

Kekerasan menurut Martono (Lohy & Pribadi, 2021) sering di gunakan individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi yakni dalam bidang politik (seperti konflik yang terjadi saat pilkada berlangsung), sosila, budaya Pendidikan (pada saat masa orientasi siswa dan mahasiswa), serta dalam masalah rumah tangga. Perilaku kekerasan adalah perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan, perilaku menyimpang kekerasan sering dikaitkan dengan remaja, remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dibarengi dengan kemajuan teknologi dan informasi dari luar dapat dengan mudah di terima oleh remaja karena remaja cepat beradaptasi dan memiliki rasa keingintahuannya yang besar (Choerunnisa et al., 2020). Karena itu remaja sering terlibat dalam Tindakan- Tindakan yang menyimpang. Seperti tawuran, bullying, pergaulan bebas. Salah satu perilaku remaja yang menyimpang secara umum turun di turun temurunkan bahkan di jadikan tradisi di suatu Lembaga Pendidikan ialah tradisi senioritas.

Senioritas adalah keadaan di mana seseorang dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi berdasarkan usia, pengalaman, serta pangkat karena telah mendalami suatu bidang dalam jangka waktu yang lama. Istilah senior sebenarnya telah lama tertanam dalam masyarakat akibat budaya menghargai yang lebih tua dan mencintai yang lebih muda. Namun, seiring berjalannya waktu, kesalahpahaman yang salah dan tetap dipertahankan sehingga pada akhirnya menciptakan siklus pemahaman yang buruk (Asyrafal et al., 2024).

Dapat dilihat beberapa negara-negara maju yang sudah berhasil memperbaiki kualitas pendidikannya, hal ini di buktikan melalui survey yang di buat oleh Ceoword Magazine mengenai perangkingan negara dengan sistem Pendidikan terbaik di tahun 2024, Dimana pada urutan pertama United Kingdom, United State di urutan kedua, Australia di urutan ke tiga, Netherlands di urutan ke empat, dan Sweden di urutan ke lima. Sedangkan menurut data tersebut Indonesia menempati urutan 70 dari total 93 negara. Tidak hanya itu untuk lingkup Kawasan asia Tenggara, Indonesia masih menempati urutan yang sangat rendah hal ini membuktikan bagaimana sitem Pendidikan yang ada di Indonesia yang masih sangat jauh untuk dikatakan baik (Despina Wilson, JD, 2024).

Negara dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi cenderung menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks kehumasan, seorang praktisi humas dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi seiring dengan perkembangan zaman guna menghadapi tantangan baru. Di era digital saat ini, informasi menyebar dengan sangat cepat, terlebih karena siapapun dapat menjadi sumber informasi. Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih memilih media sosial sebagai wadah untuk menyampaikan ketidakpuasan. Berbeda dengan era sebelum kehadiran media sosial, di mana masyarakat cenderung menyampaikan ketidakpuasan secara langsung kepada pemberi layanan. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi praktisi humas dalam mengelola opini publik dan menjaga reputasi organisasi (Prasojo, 2024)

Selain itu, situasi krisis perlu sesegera mungkin untuk di tangani atau dengan kata lain dilakukannya manajemen krisis. Setiap Perusahaan pasti akan mengalami krisis hal ini hanya waktu yang dapat menjawab, cepat atau lambat setiap organisasi akan mengalami krisis yang dapat megancam performa dan eksistensi organinasi (Adolph, 2016) disaat inilah peran humas sangat memegang peran yang sangat sentral. Hal ini disebabkan, dalam lingkup seorang humas yaitu membangun relasi dengan *public*; membangun citra dan reputasi yang positif dalam presepsi public, penyuplai, konsumen dan staf pemeritah; sebagai fungsi manajemen; dan strategi menciptakan symbol dan klarifikasi melalui komunikasi (Anggraini & Setyanto, 2019).

Definisi humas pemerintah pada buku “The Practice of Government Public Relations” menurut Bowen (Lee et al., 2012) yaitu sebagai pelaksana fungsi komunikasi yang menghubungkan interaksi pemerintah dengan warga negara, regulator, Lembaga legislative serta perpanjangan tangan dalam kebijakan pemerintah. Humas pemerintah juga turut membantu memberukan fasilitas komunikasi dengan konstituensi dan public pemerintahan.

Dalam konteks kehumasan di Indonesia, pengelolaan kehumasan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan itu, pengertian umum kehumasan di lingkungan instansi pemerintah, untuk selanjutnya disebut humas pemerintah adalah Lembaga humas dan/atau praktisis humas pemerintah yang melakukan

fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi persuasif, efektif dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta humanis kepada publiknya melalui berbagai sarana yang dimiliki seorang humas dalam rangka untuk menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah. Dalam konteks ini instansi pemerintah meliputi kementerian negara, Lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), lembaga nonstruktural (LNS), sekretariat lembaga tinggi negara dan lembaga negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Manajemen krisis adalah salah satu tugas utama humas karena profesi ini dituntut untuk proaktif dalam memprediksi masalah organisasi dan menyiapkan strategi komunikasi saat krisis terjadi, dengan tujuan menjaga informasi yang akurat bagi media dan pemangku kepentingan, Reddi (Kartika, 2024). Menurut Petrovici (Adolph, 2016), peran humas sangat krusial dalam situasi krisis, karena mereka dapat membantu organisasi mengantisipasi dan merespon krisis secara efektif jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, humas harus dipandang sebagai instrumen penting dalam penanganan krisis, Petrovici (Wardiman & Amanag, 2022)

Manajemen krisis, menurut Smith (Purwaningwulan, 2013), ialah serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi untuk menanggulangi masalah yang muncul di luar kendali organisasi. Berbeda dengan itu, Delvin (Suryani & Sagiyanto, 2018) memberikan definisi bahwa manajemen krisis merupakan Tindakan-tindakan yang terstruktur yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh krisis.

Coombs (Mia, 2023) menjabarkan bahwa manajemen krisis sebagai strategi yang sengaja di susun untuk memerangi krisis dalam Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan yang di timbulkan oleh krisis tersebut, intinya manajemen krisis berupaya untuk mencegah atau mereduksi akibat buruk yang di timbulkan oleh suatu krisis, dengan tujuan untuk melindungi organisasi, para pemangku kepentingan, atau sektor industri dari dampak kerugian. Manajemen krisis sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai komponen, seperti langkah-langkah pencegahan, perencanaan, manajemen krisis, dan penilaian paskah krisis atau bisa disebut evaluasi. Komunikasi sangat memegang peran yang sangat vital dalam penerapan manajemen krisis, Coombs (Choerunnisa et al., 2020)

Ada beragam cara yang bisa digunakan untuk menghadapi krisis, dalam penelitian oleh Verhoeven dkk. (Nanie & Widyorini, 2023) melakukan penelitian terhadap praktisi komunikasi pada 43 negara yang ada di Eropa, hasilnya menemukan 5 strategi komunikasi yang digunakan praktisi dalam menghadapi krisis, yaitu; strategi penyebaran informasi, strategi simpati, strategi defensif, strategi *apology*, strategi *sit out*. Sedangkan alat komunikasi utama yang digunakan ialah, media relations, komunikasi personal dengan *stakeholder*, melalui media organisasi seperti *websites* dan internet.

Sedangkan, dalam (Gayatri Mistar & Dewi, 2017) mengungkapkan bahwa penanganan krisis komunikasi dalam kasus suap Annas Maamun pada tahun 2014, pengelolaan krisis ini di tangani melalui serangkaian Tindakan strategis, langkah-langkah yang di ambil mencakup pembentukan tim khusus untuk mengelola

komunikasi krisis, respon cepat terhadap media massa, pengumpulan data dan fakta yang relevan, diadakannya konferensi pers serta Upaya untuk menjaga reputasi, menunjuk kepala biro sebagai juru bicara resmi dan menggunakan beragam sarana komunikasi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui strategi manajemen krisis humas Kementrian Perhubungan dalam mengahapi kasus penganiayaan taruna oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) jakarta, STIP adalah lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementrian Perhubungan melalui (BPSDMP) badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Kasus ini dapat mempengaruhi citra dan reputasi Kementerian Perhubungan, kepuasan Masyarakat dan presepsi terhadap kinerja Kemenhub, serta dapat melahirkan rasa ketidakpercayaan di Masyarakat terhadap Kemenhub. Mengingat pentingnya peran seorang hymas dalam penerapan manajemen krisis dan peran tersebut juga sudah di atur dalam peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Kehumasan dalam lingkup Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Pasal 10 poin D yaitu Manajemen Krisis.

Humas Kementrian Perhubungan di pilih karena tinggi nya respon Masyarakat atas kejadian penganiayaan taruna oleh seniornya di STIP Jakarta, dikarenakan kasus serupa sebelumnya pernah terjadi, hal ini yang menyebabkan Masyarakat merasa kecewa terulangnya kejadian seperti itu. Fokus pada penelitian ini adalah penerapan manajemen krisis yang di lakukan oleh humas

Kementrian Perhubungan Ketika krisis ini terjadi, dan setelah krisis ini terjadi. Sehingga, dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana humas Kementrian Perhubungan melakukan manajemen krisis dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), dan diharapkan penelitian ini bisa di jadikan masukan STIP maupun humas Kementrian Perhubungan dalam menjalankan strategi manajemen krisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang yang di buat mengenai Humas Kementrian Perhubungan dalam menangani krisis akibat kasus penganiayaan taruna oleh seniornya di STIP, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah humas Kementrian Perhubungan dalam penerapan manajemen krisis yang dilakukan humas Kementrian Perhubungan dalam kasus penganiayaan taruna yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah-langkah dalam penerapan manajemen krisis yang di lakukan humas Kementrian Perhubungan terkait kasus penganiayaan taruna oleh seniornya di STIP, Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sumber referensi akademis yang memiliki fokus serupa, yaitu mengenai strategi manajemen krisis humas pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta saran kepada humas Kementrian Perhubungan dan lembaga pedidikan STIP dalam pengelolaan manajemen krisis.

1.4.3 Manfaat Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai infromasi dan evaluasi yang di lakukan Kementrian Perhubungan dalam memperbaiki sistem Pendidikan kedinasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi empat bab, yang terdiri dari

Bab I yang berisi dari pendahuluan selanjutnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi dari manfaat akademis atau teoritis, mafaat praktis, manfaat sosial, dilanjutkan dengan sistematika penulisan, metode penelitian yang meliputi atas tipe penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data yang di ambi.

Bab II meliputi profil instansi, terdapat sejara singkat instansi, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, struktur birokrasi, dasar hukum dan regulasi, serta

kegiatan yang diimplementasikan, selanjutnya penelitian terdahulu (*state of the art*), landasan teoritis, definisi konseptual, operasionalisasi konsep, profil instansi.

Bab III berisi tujuan pemahaman yang menyeluruh mengenai penelitian melalui dua bagian, yaitu tinjauan teori dan tinjauan praktik. Tinjauan teori bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep dasar yang relevan dengan topik penelitian, sedangkan tinjauan praktik bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks nyata di instansi yang diteliti.

Bab IV penutup, pada bab ini menyampaikan simpulan, keterbatasan dan saran

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap strategi manajemen krisis yang di lakukan humas Kementrian Perhubungan dalam kasus penganiayaan taruna di STIP Jakarta. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen pribadi.

1.6.2 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui wawancara terhadap narasumber, dalam hal ini narasumber yang di mintai wawancara ialah Bapak Ridho Dwi Laksono, S.Si Ahli Muda - Pranata Hubungan Masyarakat Ketua tim anevprokom

1.6.1 Jenis dan Sumber Data

Data Primer adalah suatu data yang didapatkan langsung dari objek

penelitian. Hal ini diperoleh langsung dari wawancara, observasi dan partisipasi langsung. Pada Penelitian ini peneliti mencari data dengan komunikasi langsung dengan kabag secara langsung.

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan yang menjadi data penunjang. Data sekunder didapatkan dari sumber luar seperti buku, laporan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pada data sekunder ini peneliti mendapatkan sumber dari buku, jurnal ilmiah, dan

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian bertujuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian dan diharapkan bisa lebih terarah dan sesuai dengan harapan yang bisa dipertanggung jawabkan. Metode penelitian pada penelitian ini antara lain:

A. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka antara peneliti dan narasumber dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian. Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki peran dalam pengelolaan kehumasan Kementrian Perhubungan

B. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung atau observasi ke lokasi penelitian yaitu Kementrian Perhubungan Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang ada serta agar mendapatkan data

yang sesuai dengan keadaan di tempat penelitian.

C. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pelengkap dari metode sebelumnya yaitu wawancara dan observasi. Pada tahapan dokumentasi peneliti mengumpulkan hasil yang sudah di dapat yang nantinya akan dimasukan pada hasil penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan berupa tulisan dan gambar yang akan menjadi pelengkap dari metode wawancara dan observasi

D. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan cara berfikir yang berkaitan erat dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian. Teknik analisis data juga bertujuan untuk menemukan sebuah solusi atau mengambil suatu kesimpulan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian, Peneliti akan menganalisis menggambarkan secara lebih ringkas tentang berbagai kondisi dan situasi dari beberapa sumber data yang telah dikumpulkan dalam bentuk hasil wawancara ataupun pengamatan oleh peneliti mengenai permasalahan pada objek penelitian.